




UPAYA MENDORONG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI PEMILU




Biaya pemilu di Indonesia sangat tinggi dan cenderung meningkat dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Biaya pelaksanaan pemilu bersumber dari APBN, maupun dari para peserta pemilu, dalam rangka kampanye.



Berdasarkan pengujian yang dilakukan, pemilu hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di wilayah barat Indonesia.



Faktor ketimpangan menjadi salah satu penyebab mengapa pemilu cenderung hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap provinsi-provinsi di wilayah barat Indonesia.



Komisi II DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi serta mempertimbangkan redesain sistem perhitungan dapil dan alokasi kursi di parlemen terutama dari timur Indonesia.

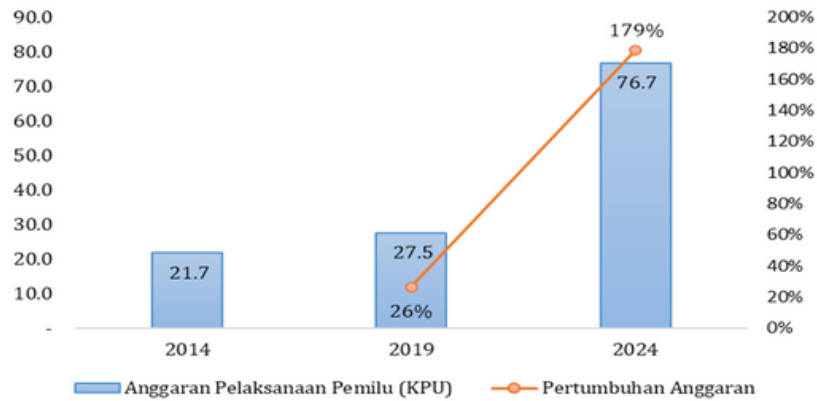
Semakin membaiknya pelaksanaan demokrasi di Indonesia harapannya dapat membawa perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Secara teoritis, pengaruh pemilu terhadap perekonomian dalam jangka panjang dapat dikaitkan dengan principal-agent theory (Xu 2011: 1106; Bardhan 2002: 190-192; Przeworski and Limongi 1993: 58), dimana masyarakat selaku pemilih, menuntut pemerintah selaku “agent” untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan.

Sistem pemilu secara langsung yang dipraktikan di Indonesia, dimana kedaulatan tertinggi dalam memilih ada di tangan rakyat, seharusnya dapat mendorong terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Yaitu yang memiliki visi-misi serta rencana pembangunan yang jelas bagi Indonesia kedepannya. Jika itu yang terjadi, maka seharusnya dalam jangka menengah dan panjang dampak dari pemilu tersebut akan mendorong perbaikan dan pemerataan perekonomian serta pembangunan di Indonesia.

Sementara dalam jangka pendek, dampak pemilu terhadap perekonomian dapat terlihat lebih jelas. Dalam teori pertumbuhan Keynes menjelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan belanja (konsumsi) pada suatu perekonomian, maka akan meningkatkan pendapatan yang membuat perekonomian berputar lebih cepat (Mankiw, 2006). Dalam konteks pemilu, pemilu akan menyebabkan peningkatan belanja negara dalam rangka persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemilu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, masing-masing para peserta pemilu juga tentunya akan mengalokasikan sumber daya modalnya dalam jumlah yang tidak sedikit untuk kegiatan kampanye.

Dilihat dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, biaya pemilu di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari satu periode ke periode setelahnya. Pada Gambar 1 memperlihatkan bagaimana tren peningkatan biaya pelaksanaan pemilu di Indonesia. Biaya pelaksanaan pemilu tahun 2014 mencapai Rp21,7 triliun, meningkat sebesar 26,5% pada pemilu 2019 menjadi Rp27,4 triliun. Bahkan, kebutuhan anggaran pemilu tahun 2024 mendatang diperkirakan sebesar Rp76,6 triliun, atau meningkat hingga 179% dibandingkan biaya pelaksanaan pemilu tahun 2019 lalu (LHP BPK 2021).

Gambar 1. Perkembangan Biaya Pelaksanaan Pemilu Sejak Tahun 2014 (Triliun Rupiah)



Sumber: LHP BPK 2021, diolah (2023).

Selain biaya pelaksanaan pemilu yang cukup tinggi, besarnya biaya kampanye dalam pelaksanaan pemilu juga mendorong meningkatnya aliran uang dalam perekonomian selama masa pemilu. Hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) (2014) mengidentifikasi bahwa perkiraan dana kampanye yang dikeluarkan pada pemilu legislatif 2014 mencapai Rp750 juta – Rp4 miliar untuk tingkat DPR RI, dan sebesar Rp250 – Rp500 juta untuk tingkat DPRD Provinsi.

Sedangkan pada pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan hasil audit dana kampanye tahun 2014, didapati total dana kampanye untuk seluruh pasangan calon sebesar Rp478,9 miliar. Jumlah dana kampanye dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya tentunya akan meningkat. Berdasarkan hasil audit dana kampanye tahun 2019, didapati total dana kampanye untuk seluruh pasangan calon sebesar Rp805,6 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekitar 68% dibandingkan biaya kampanye pada pemilu 2014.

Tingginya biaya pelaksanaan pemilu, serta meningkatnya perputaran uang selama proses pemilu seharusnya memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Hasil penelitian Rao (2023) menjelaskan bahwa dari 4 (empat) pemilu terakhir di Indonesia, ditemukan bahwa tingkat konsumsi cenderung meningkat hingga 25% dibandingkan periode sebelum pemilu. Setelah pemilu, tren konsumsi cenderung stabil, bahkan sedikit mengalami penurunan. Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya peningkatan permintaan selama masa kampanye, dan peningkatan pengeluaran pada pelaksanaan pemilu selama periode tersebut.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Bank Indonesia melaporkan bahwa dampak pemilu tahun 2009 terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 0,23% – 0,26% di tahun 2009. Sementara pada pemilu 2014, dampak pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,13% - 0,19% (Perwitasari, 2013). LPEM tahun 2014 juga mengungkapkan hal yang sama, dimana besarnya perputaran dana selama kampanye, menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi walaupun tidak signifikan.

Ada Perbedaan Dampak Pemilu Terhadap Perekonomian Antar Wilayah di Indonesia

Hasil pengujian regresi yang dilakukan tim Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) tahun 2023 terhadap dampak pemilu 2014 dan 2019 terhadap perekonomian, baik secara agregat, maupun secara wilayah, menunjukkan hasil yang berbeda. Secara agregat, pemilu berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara dilihat berdasarkan wilayahnya, pemilu berdampak positif dan signifikan terhadap PDRB pada wilayah barat Indonesia, namun tidak berpengaruh signifikan pada PDRB di wilayah tengah dan timur Indonesia.

“

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, pemilu hanya berdampak signifikan terhadap perekonomian di wilayah barat Indonesia.

Hasil pengujian regresi tersebut diperkuat dengan pengujian statistik uji beda (Mann-Whitey Test) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan dampak pemilu tahun 2014 dan 2019 terhadap PDRB antara wilayah barat Indonesia, dengan wilayah tengah dan timur Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dampak pemilu terhadap perekonomian antar wilayah tersebut, salah satunya yaitu ketimpangan sosial ekonomi.

Dilihat dari sebaran PDRB antar kedua wilayah, Secara rata-rata tahun 2014 - 2022, share GDP wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali (wilayah barat Indonesia) mencapai 81%, sedangkan share GDP wilayah timur Indonesia hanya sebesar 19% (Tabel 1). Sementara dilihat dari indikator pembangunan lainnya juga menunjukkan hasil yang relatif sama. Perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia secara rata-rata tahun 2014 – 2022, menunjukkan bahwa kondisi SDM di wilayah timur Indonesia lebih rendah baik dibandingkan dengan rata-rata secara nasional, maupun dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan baik secara kualitas, maupun secara kuantitas dalam hal pelayanan dasar, baik terkait layanan pendidikan maupun layanan kesehatan antar kedua wilayah. Adanya ketimpangan pelayanan dasar antar kedua wilayah tersebut juga tentunya berdampak terhadap indikator kemiskinan pada kedua wilayah. Pada wilayah timur Indonesia, dengan tingkat pelayanan dasar yang lebih rendah dibandingkan wilayah barat, menyebabkan tingkat kemiskinan pada wilayah timur lebih tinggi dibandingkan pada wilayah barat Indonesia.

Tabel 1. Kondisi Ketimpangan Indikator Makro dan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia

Wilayah	Jumlah Provinsi	Share GDP per Wilayah (rata-rata data tahun 2014 - 2022)	Indeks Pembangunan Manusia (rata-rata data tahun 2014 - 2022)	Tingkat Kemiskinan 2022 (%)	Jumlah Penduduk 2022	Luas Wilayah (KM ²)
Sumatera, Jawa, Bali	17	81%	72,5	8,60%	217.035.687	614.001
Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua	17	19%	67,0	13,80%	56.246.892	1.278.409
Nasional	34	100%	71,1	9,5	273.282.579	1.892.410

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014 – 2023, diolah (2023).



Ketimpangan menjadi salah satu penyebab mengapa pemilu cenderung hanya berpengaruh signifikan pada wilayah barat Indonesia

Berdasarkan ketimpangan sosial ekonomi yang dijelaskan tersebut, membawa terjadinya ketimpangan pada jumlah penduduk antar wilayah. Secara demografi, penduduk di wilayah barat Indonesia mencapai 217 juta penduduk, atau sebesar 79,4% dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Sementara jumlah penduduk di wilayah timur Indonesia hanya sekitar 56,2 juta penduduk, atau sebesar 20,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia.

Jumlah penduduk menjadi salah satu aspek paling penting yang mempengaruhi perekonomian dan pembangunan di suatu wilayah. Tingginya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah barat Indonesia tidak terlepas dari adanya ketimpangan baik terkait sumber daya, infrastruktur, lapangan pekerjaan, sumber-sumber permodalan, pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan, kesehatan, dan layanan pemerintah lainnya yang sejauh ini masih dominan ada di wilayah barat Indonesia.

Sistem pemilihan umum di Indonesia, secara tidak langsung juga lebih menguntungkan daerah di wilayah barat Indonesia. Dengan sistem pemilihan secara langsung, dengan menganut sistem *one man, one vote, one value*, maka sistem tersebut akan cenderung menguntungkan daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi, yakni pada wilayah barat Indonesia. Para partai politik peserta pemilu tentunya akan fokus terhadap daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang besar untuk mendapatkan dukungan dan suara sebesar-besarnya. Aktivitas kampanye juga tentunya akan banyak dialokasikan pada daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga perputaran uang juga hanya akan tinggi pada daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi, yaitu wilayah barat Indonesia.

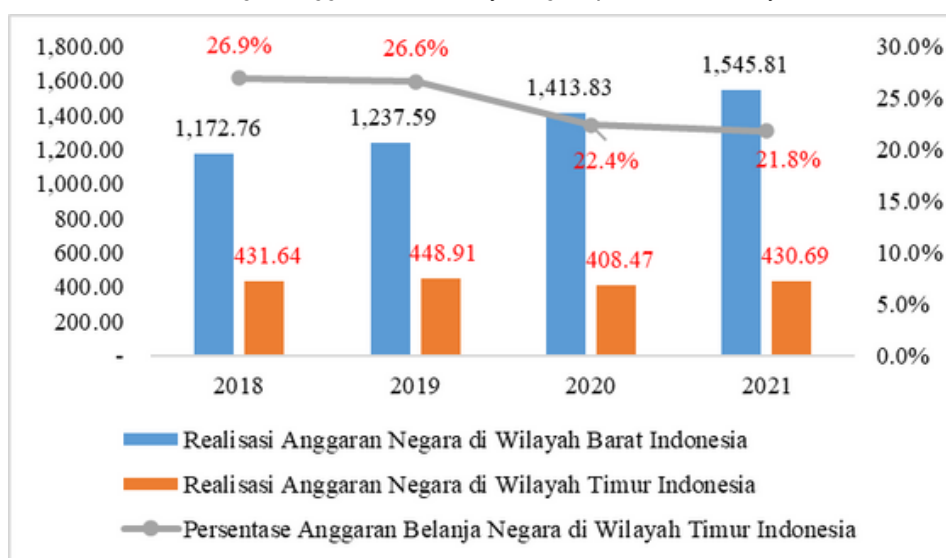
Demikian halnya ketika sudah terpilih, Presiden dan Wakil Presiden terpilih umumnya juga akan cenderung lebih banyak mengalokasikan program-program pembangunannya pada wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi untuk menjaga elektabilitas diri dan partainya. Selain itu, melakukan pembangunan di wilayah barat Indonesia yang notabene lebih banyak penduduk, cenderung akan mendapatkan perhatian dan atensi yang lebih besar dari publik, dibandingkan melakukan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan terjadi, maka persoalan ketimpangan di Indonesia tidak akan mendapatkan titik terang.

Pemerintah dan Upaya Mengatasi Ketimpangan di Indonesia

Pemerintah serta Presiden terpilih tidak pernah membiarkan permasalahan ketimpangan pembangunan di Indonesia terjadi secara terus-menerus. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia tahun 2005 – 2025, memfokuskan salah satunya pada terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, ditandai dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Begitu juga pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia, Program Pengurangan Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah selalu menjadi fokus di setiap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia, setidaknya sejak tahun 2004.

Namun, hingga kini berdasarkan Tabel 1, ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi. Banyak faktor yang sebenarnya ikut menjadi penyebab mengapa komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan wilayah belum membuahkan hasil yang optimal selama ini. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran negara, serta keberpihakan dan politik anggaran antar wilayah. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah perlu membatasi dan menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Selain itu, dengan kondisi kependudukan Indonesia yang lebih dari 75% ada di wilayah barat Indonesia, menyebabkan secara politik anggaran juga akan berpihak pada daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.

Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Belanja Negara pada Kedua Wilayah di Indonesia



Sumber: Nota Keuangan Tahun 2020 – 2023, diolah (2023).

Perspektif mengenai efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran akan lebih tinggi jika dialokasikan pada daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, nampaknya perlu ditinjau kembali. Permasalahannya, jika pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan wilayah di timur Indonesia, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur, dan pembukaan lapangan pekerjaan, maka sampai kapanpun masyarakat tidak akan melakukan transmigrasi dari wilayah barat Indonesia, menuju wilayah timur Indonesia. Hal itu berarti, persoalan ketimpangan di Indonesia juga tidak akan terselesaikan.

Penutup

Adanya berbagai ketimpangan kondisi sosial ekonomi yang terjadi antara kedua wilayah tersebut menyebabkan konsentrasi masyarakat menjadi terpusat di wilayah barat Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah barat Indonesia, dengan hampir 79% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Sementara sumber daya manusia menjadi salah satu aspek terpenting dalam mendorong perekonomian dan pembangunan. Dengan tingginya ketimpangan antar kedua wilayah tersebut, akan sulit mengharapkan masyarakat berpindah dari wilayah barat ke timur Indonesia. Sistem pemilu “one man, one vote” yang diterapkan Indonesia saat ini, tentunya akan lebih menguntungkan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar.

Kedepannya, dalam rangka mengatasi ketimpangan antar wilayah tersebut, DPR RI terutama melalui Komisi II, perlu mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi capaian pembangunan di daerah. Selain itu, Komisi II DPR RI juga perlu mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri, serta *stakeholder* terkait lainnya untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan redesain mekanisme perhitungan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi per dapil, serta sistem perhitungan suara pada pemilu agar representasi dan suara dari daerah timur Indonesia dapat lebih terlihat. Aspek wilayah serta aspek kesetaraan perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam proses pemilu kedepan. Dengan demikian, harapannya pemilu kedepannya tidak hanya berdampak terhadap pembangunan di wilayah barat di Indonesia. Selain itu, jika hal tersebut dapat dilakukan harapannya juga akan menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

Referensi

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Pemilu 2014 dan 2019. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Data *Gross Domestic Regional Bruto*, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Luas Wilayah Indonesia, dan Jumlah Penduduk. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/>.
- Bardhan. (2002). “*Decentralization of Governance and Development.*” *Journal of Economic Perspectives* 16 (4): 185-205.
- LPEM. (2014). Dampak Pemilihan Umum 2014 Terhadap Indikator Makroekonomi, LPEM FEUI *Brief*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mankiw. (2006). Pengantar Teori Ekonomi Makro. Third Edition. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Indonesia. (2023). Nota Keuangan beserta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 – 2023.
- Przeworski, A., and F. Limongi. 1993. “*Political Regimes and Economic Growth.*” *Journal of Economic Perspectives* 7 (3): 51-70.
- Xu. 2011. “*The Fundamental Institutions of China’s Reforms and Development.*” *Journal of Economic Literature* 49 (4): 1076-1151.



Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggungjawab : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Penyusun : Riza Aditya S., Rendy Alvaro, dan Nova Aulia B.